



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SDM 2018**

**KOTA PADANG PANJANG  
2017**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disertai indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD.

Proses penyusunan Renja OPD dibagi atas dua tahap, yaitu tahap perumusan rancangan dan tahap penyajian. Proses penyusunan rancangan Renja OPD mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil pengkajian terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Melalui proses penyusunan secara terintegrasi ini diharapkan akan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, dan semakin terarahnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Renja OPD dan RKPD merupakan bagian proses awal tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan Negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, disusunlah rancangan KUA dan rancangan PPAS. Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan RKA OPD.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16 );
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan tahapan pembangunan daerah periode lima tahun (2013 – 2018) yakni memantapkan kemandirian daerah dengan menekankan pada pembangunan sumber daya manusia, lingkungan hidup dan tata ruang, infrastruktur, hukum dan pemerintahan, serta penyelenggaraan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 48 Tahun 2016.

Dengan disusunnya Renja tahun 2018 diharapkan BKPSDM Kota Padang Panjang akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan kewenangan.

## **1.4 Sistematika**

Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu (2016) dan Capaian Renstra OPD
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
  - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
  - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV : PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (TA 2016)

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD

Pada tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Padang Panjang mendapatkan alokasi dana belanja langsung sebesar Rp. 3.230.435.100,- yang tersebar ke dalam 6 program dengan 35 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi keuangan untuk belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp.2.864.645.791,- atau 88,68%.

Untuk lebih jelasnya capaian realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Program dan Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2016		
		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>948.142.000</b>	<b>886.328.857</b>	<b>93,48</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.927.480	98,19
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	54.000.000	47.046.225	87,12
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas	240.545.000	210.647.791	87,57
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	75.000.000	67.050.000	89,40
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	107.707.000	92.571.122	85,95
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.000.000	36.995.200	99,99
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.900.000	40.900.000	100
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000	8.494.900	99,94
9.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	24.040.000	23.996.500	99,82
10.	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	330.000.000	328.249.639	99,47
11.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	26.450.000	26.450.000	100
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>326.345.000</b>	<b>264.621.000</b>	<b>81,09</b>
1.	Pengadaan Mebeleur	24.440.000	24.440.000	100
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.000.000	12.975.000	99,81
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	28.455.000	22.616.100	79,48
4.	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	260.450.000	204.590.000	78,55
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>728.220.100</b>	<b>694.559.350</b>	<b>95,38</b>
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.600.000	30.600.000	96,84
2.	Sosialisasi Blanko LHKPN	14.050.100	10.981.900	78,16
3.	Penyelenggaraan Diklt Teknis dn Fungsi Bagi PNSD	409.220.000	388.827.450	95,02
4.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD	273.350.000	264.150.000	96,63
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>100</b>
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	262.500	262.500	100
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	262.500	262.500	100
3.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	140.000	140.000	100

4.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	175.000	175.000	100
<b>V.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>724.898.000</b>	<b>597.167.105</b>	<b>82,38</b>
1.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	34.575.000	31.425.000	90,89
2.	Seleksi Penerimaan CPNS	49.850.000	36.000.405	72,22
3.	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	16.675.000	16.670.875	99,98
4.	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	30.375.000	29.915.000	98,49
5.	Pemberian Bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas	211.790.000	207.865.000	98,15
6.	Pengembangan PNS Melalui Jabatan Fungsional Tertentu	6.175.000	6.175.000	100
7.	Proses Penerbitan Karis, Karsu, Taspen, Askes dan Satya Lencana Karya Lencana Karya Satya	5.750.000	5.674.950	98,69
8.	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SAPK)	41.423.000	40.320.000	97,34
9.	Penataan / Penyelamatan Dokumen dan Arsip PNS	9.905.000	9.904.375	99,99
10.	Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural	318.380.000	213.216.500	66,97
<b>VI.</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>501.990.000</b>	<b>421.129.379</b>	<b>83,89</b>
1.	Pendidikan Perjenjangan Struktural	295.425.000	218.524.400	73,97
2.	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	206.565.000	202.604.979	98,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.230.435.100</b>	<b>2.864.645.791</b>	<b>88,68</b>

Dari 6 program dan 35 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal, yaitu :

1. Seleksi Penerimaan CPNS

Realisasi keuangan untuk kegiatan ini hanya sebesar 72,22%, hal ini disebabkan karena masih adanya pembatasan penerimaan CPNS di tahun 2016 yang didasarkan pada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B:/2631/M.PAN-RB/07/2016 tanggal 25 Juli 2016. Sementara persiapan, konsultasi dan koordinasi tentang formasi penerimaan CPNS sudah dilaksanakan ke Kemenpan RB dan BKN sejak awal tahun anggaran.

2. Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural

Realisasi keuangan kegiatan ini hanya Rp.213.216.500, atau 66,97% dari anggaran yang tersedia. Namun secara fisik, kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan harapan dengan capaian fisik 100%. Adapun hasil capaian dari kegiatan ini adalah dengan diangkatnya pejabat eselon II/b sebanyak 10 orang dan Fungsional Umum yang dipromosikan sebanyak 42 orang.

3. Pendidikan dan Penjenjangan Struktural

Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.218.524.400,- atau sebesar 73,97%. Namun secara fisik, kegiatan ini telah terlaksana 100%. Dimana Badan Kepegawaian Daerah telah mengirim peserta Diklat PIM II sebanyak 2 orang, PIM III sebanyak 2 orang dan PIN IV sebanyak 6 orang.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah yang berfungsi membantu Walikota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Pelaksanaan manajemen kepegawaian merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan penunjang daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menyangkut pengelolaan manajemen kepegawaian di daerah, belum ada acuan yang dijadikan dasar untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan kondisi itu maka pelaksanaan pelayanan manajemen kepegawaian di daerah mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang disusun berdasarkan urusan-urusan wajib yang diserahkan Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Lampiran XIII Perda Nomor 12 tahun 2008 dimaksud maka pelayanan manajemen kepegawaian antara lain meliputi perencanaan formasi, pengadaan, kenaikan pangkat, mutasi dan promosi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian, pembinaan disiplin, fasilitasi kartu identitas pegawai seperti : Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), Kartu Taspen, Kartu Suami / Isteri, pemutakhiran data PNS, serta proses pemberhentian dan pensiun PNS. Untuk melaksanakan manajemen kepegawaian tersebut, sebagian besar berpedoman kepada aturan yang berlaku, mengingat sebagian sistem manajemen kepegawaian secara nasional sama penerapannya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa BKPSDM belum menyusun SPM di bidang kepegawaian, maka pelaksanaannya mempedomani Pasal 11 PP Nomor 38 Tahun 2008, karena untuk pengelolaan manajemen kepegawaian ini sudah ada prosedur yang diberlakukan secara nasional seperti kenaikan pangkat, pembinaan disiplin maupun promosi dan mutasi, maka standar pelayanannya mengacu kepada aturan terkait seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian maupun Keputusan Bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Kinerja pelayanan pada BKPSDM secara umum sudah terlaksana dengan baik, sebagai contoh untuk proses kenaikan pangkat tahun 2016 dapat direalisasikan sebanyak 381 pegawai, dengan rincian kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2016 sebanyak 226 orang, dan periode 1 Oktober 2016 sebanyak 155 orang. Sesuai dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, maka dalam 1 tahun, ada 2 (dua) periode Kenaikan Pangkat yaitu bulan April dan bulan Oktober. Secara umum, Kenaikan Pangkat dan pensiun PNS yang menjadi kewenangan Walikota yaitu untuk PNS golongan I/b s/d III/d kinerja pelayanannya cukup baik, namun untuk golongan IV/a dan seterusnya yang menjadi kewenangan Gubernur atau Presiden, maka kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh Gubernur Cq. BKD Provinsi serta Presiden (Sekretariat Kabinet). Namun untuk menyikapinya, BKPSDM mengirimkan berkas administrasi kepada Sekretariat Kabinet dan BKN Pusat lebih cepat, seperti untuk berkas pensiun disampaikan minimal 7 bulan sebelum PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM**

Pada hakikatnya, isu merupakan suatu gambaran wacana yang masih diperdebatkan dan belum ditangani dan diolah secara optimal ke dalam suatu agenda pada lembaga tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang bisa terjadi pada arah tujuan, cara, prinsip, lokasi, waktu dan kelompok - kelompok yang memperoleh keuntungan atau kerugian akibat dampak atau hasil pemecahan isu tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, tuntutan terhadap pelaksanaan manajemen SDM aparatur juga telah terjadi pergeseran. Saat ini, sebagian besar masyarakat menginginkan suatu bentuk pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas dari aparatur. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas tersebut, tentu saja dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi dan tingkat kesejahteraan aparatur tersebut. Namun yang paling penting untuk mewujudkan hal tersebut, adalah kemauan yang kuat dari semua pihak, untuk bersama-sama memperbaiki pelayanan.

Dengan demikian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam proses pelaksanaan manajemen kepegawaian, juga berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Isu penting yang berkaitan dengan BKPSDM adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana gedung kantor dan diklat masih terbatas. Guna mendukung peningkatan kualitas aparatur perlu segera dibangun gedung kantor dan diklat yang representatif.
2. Alokasi dana untuk program pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM masih rendah, untuk itu perlu ditingkatkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional.
3. Perlu adanya kesadaran bagi ASN untuk menambah kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta dukungan dari pimpinan SKPD terkait
4. Peta jabatan dan pola karir ASN Pemerintah Kota Padang Panjang masih belum terimplementasikan sepenuhnya, yang menyebabkan belum bisa dilihat berapa kebutuhan masing-masing OPD untuk tamatan pendidikan. Sehingga bagi ASN yang mengajukan tugas belajar / izin belajar belum dapat diarahkan dalam hal memilih jurusan yang dibutuhkan. Pemberian tugas belajar / izin belajar masih berdasarkan keinginan ASN yang bersangkutan, belum kebutuhan tupoksi OPD terkait.
5. Untuk mewujudkan PNS yang handal, professional dan bermoral dan mengacu kepada PP nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PSN, maka diperlukan pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan tersebut yang meliputi 4 kegiatan, yaitu : pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS, pelaksana PP Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian, serta kegiatan pengelola disiplin jam kerja.

6. Dalam rangka keseragaman dalam memproses izin perkawinan dan perceraian PNS, dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD / Unit Kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya bagi pejabat yang mengelola kepegawaian.

Isu-isu penting diatas mengisyaratkan perlunya meletakkan peningkatan pembinaan dan pengembangan PNS menjadi program prioritas dalam menyiapkan kesiapan aparatur daerah dalam menghadapi perubahan di era reformasi birokrasi ini.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Merujuk pada analisa kebutuhan OPD tahun 2018, terdapat beberapa kegiatan yang tidak tertampung dalam rancangan awal RKPD. Diantaranya pengadaan peralatan kantor, pengadaan perlengkapan kantor dan pengadaan mebeleur kantor BKPSDM yang baru, serta kegiatan Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk pembebasan lahan sebagai jalur alternatif menuju kantor BKPSDM yang baru dan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada Tabel.2.4 berikut ini.



**TABEL 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan Pencapaian Renstra 2014 - 2018**  
**Kota Padang Panjang**

**Nama OPD : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2016			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian/Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2017		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1 20 06	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		9628	4136	1600	2044	128%	1919	8099	84%	
1 20 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		106	45	21	21	100%	20	86	81%	
1 20 06 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1 20 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening air, listrik, telepon dan internet	5	2	1	1	100%	1	4	80%	

1	20	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1	20	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	43	18	9	9	100%	8	35	81%	
1	20	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	14	5	3	3	100%	3	11	79%	
1	20	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1	20	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1	20	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1	20	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	2	0	0	0%	0	2	100%	
1	20	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1	20	06	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya rapat konsultasi dalam dan luar daerah	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1	20	06	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya honorarium bagi pegawai harian	7	4	1	1	100%	1	6	86%	
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>85%</b>	
1	20	06	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Persentase pembangunan gedung kantor	100%	0	0	0	0%	0	0	0%	
1	20	06	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	7	7	0	0	0%	0	7	100%	

1	20	06	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1	20	06	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	1	0	1	1	100%	0	1	100%	
1	20	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dilengkapi dengan biopori	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1	20	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1	20	06	02	42	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab taman BKD	1	1	0	0	0%	0	1	100%	
1	20	06	02	83	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Tersedianya sertifikat tanah pemerintah daerah	1	0	0	0	0%	1	1	100%	
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	<b>424</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>54</b>	<b>346</b>	<b>82%</b>	
1	20	06	03	77	Pengadaan Mesin Absensi Online	Tersedianya mesin absensi di masing-masing OPD	54	0	0	0	0%	54	54	100%	
1	20	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	370	292	0	0	0%	0	292	79%	
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>04</b>		<b>Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS</b>		<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>52%</b>	
1	20	06	04	04	Proses Pengelolaan Pengurusan, Pemberhentian dan Pensiun PNS	Ditetapkannya keputusan bagi PNS yang memasuki pensiun/pensiun dini	115	0	0	0	0%	60	60	52%	
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas SDM aparatur</b>	<b>356</b>	<b>290</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>95%</b>	<b>36</b>	<b>364</b>	<b>102%</b>	
1	20	06	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bimtek	45	27	5	6	120%	5	38	84%	
1	20	06	05	06	Sosialisasi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990	Terlaksananya sosialisasi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.	30	0	0	0	0%	30	30	100%	



			45 Tahun 1990											
1	20	06	05	06	Sosialisasi Pengisian Blanko LHKPN	Terlaksananya sosialisasi pengisian blanko LHKPN	140	130	30	28	93%	0	158	113%
1	20	06	05	07	Penyelenggaraan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah diklat teknis yang dilaksanakan	20	14	3	4	133%	1	19	95%
1	20	06	05	08	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	jumlah diklat fungsional yang dilaksanakan	6	4	2	0	0%	0	4	67%
1	20	06	05	10	Bimbingan Teknis Administrasi Dokumen Kepegawaian	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bimtek	115	115	0	0	0%	0	115	100%
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	<b>Meningkatnya penilaian evaluasi kinerja SKPD</b>	<b>95</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>19</b>	<b>76</b>	<b>80%</b>
1	20	06	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja (Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan bulanan)	75	30	15	15	100%	15	60	80%
1	20	06	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan Keuangan Semesteran	10	4	2	2	100%	2	8	80%
1	20	06	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan Prognosis realisasi anggaran	5	2	1	1	100%	1	4	80%
1	20	06	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	5	2	1	1	100%	1	4	80%
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>29</b>		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Meningkatnya persentase penerapan sistem promosi dan mutasi aparatur yang berbasis kompetensi (the right men on the right job)</b>	<b>5516</b>	<b>2182</b>	<b>909</b>	<b>1379</b>	<b>152%</b>	<b>1107</b>	<b>4668</b>	<b>85%</b>

1	20	06	29	04	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Terlaksananya proses pembinaan karir PNS seperti mutasi, rotasi, promosi dan ujian dinas	1000	408	200	513	257%	250	1171	117%
1	20	06	29	05	Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah CPNS yang diterima	585	0	120	0	0%	120	120	21%
1	20	06	29	06	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah Surat keputusan kenaikan pangkat, gelar dan masa kerja yang diterbitkan	1447	824	225	381	169%	400	1605	111%
1	20	06	29	08	Proses Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang berhak menerima piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya	525	291	100	99	99%	50	440	84%
						Jumlah Karis, Karsu dan Taspen yang diproses	904	259	99	139	140%	140	538	60%
1	20	06	29	08	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah sidang kasus pelanggaran disiplin PNS	235	34	45	32	71%	45	111	47%
1	20	06	29	09	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang dikirim untuk tugas belajar, kerja sama pendidikan dan izin belajar	256	59	40	92	230%	47	198	77%
1	20	06	29		Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabus, Modul, Pedoman Diklat)	Jumlah buku analisis diklat	40	40	0	0	0%	0	40	100%
1	20	06	29	20	Pengembangan PNS melalui Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan karir fungsional	270	86	40	70	175%	44	200	74%
1	20	06	29	40	Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural	Terseleksinya pejabat struktural	143	156	40	53	133%	10	219	153%

1	20	06	29	42	Ujian Kompetensi PNS yang Akan Pindah ke Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah Pegawai yang mengikuti ujian kompetensi pindah	110	25	0	0	0%	0	25	23%
1	20	06	29	43	Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota Padang Panjang	Terlaksananya pembinaan terhadap PNS	1	0	0	0	0%	1	1	100%
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>63</b>		<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>		<b>390</b>	<b>157</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>56%</b>	<b>67</b>	<b>255</b>	<b>65%</b>
1	20	06	63	01	Pendidikan Penjurangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM I, II, III, IV dan diklat pra jabatan	183	128	45	10	22%	10	148	81%
1	20	06	63	01	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Terlaksananya pengiriman peserta diklat peningkatan keterampilan dan profesionalisme	207	29	10	21	210%	57	107	52%
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>66</b>		<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan arsip kepegawaian dan data base berbasis teknologi informasi</b>	<b>2600</b>	<b>1118</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>100%</b>	<b>552</b>	<b>2222</b>	<b>85%</b>
1	20	06	66	01	Penataan dan Penyelamatan Dokumen dan Arsip PNS	Jumlah dokumen pegawai unit kerja yang ditata	2400	1000	500	500	100%	500	2000	83%
1	20	06	29	07	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah buku data pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	200	118	52	52	100%	52	222	111%
					<b>JUMLAH</b>		<b>9628</b>	<b>4136</b>	<b>1600</b>	<b>2044</b>	<b>128%</b>	<b>1919</b>	<b>8099</b>	<b>84%</b>

**TABEL 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**  
**Kota Padang Panjang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
					<b>N</b>		<b>I</b>		<b>H</b>			<b>I</b>		<b>L</b>	

**TABEL 2.3**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018**  
**Kota Padang Panjang**

**Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
SDM**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019  
KOTA PADANG PANJANG**

**NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA  
PRIORITAS PERTAMA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 04	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian				9,037,730,000				4,789,703,500
3 04 01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM				9,037,730,000				4,789,703,500
3 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,066,311,000				1,091,909,000
3 04 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Padang Panjang	1 tahun	4,200,000	APBD		1 tahun	5,000,000
3 04 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening air, listrik, telepon dan internet	Padang Panjang	1 tahun	62,760,000	APBD		1 tahun	62,760,000
3 04 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Padang Panjang	1 tahun	279,367,000	APBD		1 tahun	279,367,000
3 04 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium pengelola	Padang Panjang	8 orang	95,040,000	APBD		8 orang	95,040,000

				keuangan								
3	04	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Padang Panjang	3 orang	104,522,000	APBD	3 orang	104,522,000
3	04	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Padang Panjang	1 tahun	41,800,000	APBD	1 tahun	44,500,000
3	04	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Padang Panjang	1 tahun	61,237,000	APBD	1 tahun	61,270,000
3	04	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Padang Panjang	1 tahun	6,000,000	APBD	1 tahun	8,400,000
3	04	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Padang Panjang	1 tahun	23,010,000	APBD	1 tahun	26,700,000
3	04	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya rapat konsultasi dalam dan luar daerah	Padang Panjang	1 tahun	354,000,000	APBD	1 tahun	366,850,000
3	04	01	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya honorarium bagi pegawai harian	Padang Panjang	1 orang	34,375,000	APBD	1 orang	37,500,000
<b>3</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>4,962,930,000</b>	APBD		<b>678,430,000</b>
3	04	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Persentase pembangunan gedung kantor	Padang Panjang	100%	4,884,500,000	APBD		
3	04	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Padang Panjang	4 unit printer all in one	25,000,000	APBD	1 set gordena jendela dan pintu	220,000,000

3 04 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Padang Panjang				APBD	2 Set Sound System, 4 unit infocus, 1 unit mesin foto copy, 2 unit printer	200,000,000
3 04 01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Padang Panjang				APBD	120 unit kursi rapat, 3 set meja rapat, 3 set kursi tamu, 1 set meja resepsionis	220,000,000
3 04 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dilengkapi dengan biopori	Padang Panjang	1 unit	15,000,000		APBD		
3 04 01 02 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor	Padang Panjang	1 tahun	38,430,000		APBD	1 tahun	38,430,000
<b>3 04 01 03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>58,500,000</b>				<b>-</b>
3 04 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	Padang Panjang	130 stel	58,500,000		APBD		
<b>3 04 01 04</b>	<b>Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS</b>				<b>66,375,000</b>				<b>66,375,000</b>
3 04 01 04 04	Proses Pengelolaan Pengurusan, Pemberhentian dan Pensiun PNS	Ditetapkannya keputusan bagi PNS yang memasuki pensiun/pensiun dini	Padang Panjang	55 orang	66,375,000		APBD	55 orang	66,375,000
<b>3 04 01 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>171,400,000</b>				<b>171,400,000</b>



3	04	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bimtek	Padang Panjang	5 orang	41,400,000	APBD		5 orang	41,400,000
3	04	01	05	07	Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah diklat teknis yang dilaksanakan	Padang Panjang	1 diklat	130,000,000	APBD		1 diklat	130,000,000
<b>3</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>				<b>924,000</b>				<b>924,000</b>
3	04	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja (Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan bulanan)	Padang Panjang	15 laporan	288,000	APBD		15 laporan	288,000
3	04	01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan Keuangan Semesteran	Padang Panjang	2 laporan	288,000	APBD		2 laporan	288,000
3	04	01	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan Prognosis realisasi anggaran	Padang Panjang	1 laporan	193,000	APBD		1 laporan	193,000
3	04	01	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	Padang Panjang	1 laporan	155,000	APBD		1 laporan	155,000
<b>3</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>30</b>		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>				<b>1,152,055,000</b>				<b>1,215,309,000</b>
3	04	01	30	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Terlaksananya proses pembinaan karir PNS seperti mutasi, rotasi, promosi dan ujian dinas	Padang Panjang	250 orang	44,300,000	APBD		250 orang	44,300,000
3	04	01	30	02	Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah CPNS yang diterima	Padang Panjang	120 orang	332,540,000	APBD		120 orang	365,794,000

3 04 01 30 04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah Surat keputusan kenaikan pangkat, gelar dan masa kerja yang diterbitkan	Padang Panjang	400 orang naik pangkat, 50 orang ikut ujian Penyesuaian Ijazah	103,800,000	APBD		400 org naik pangkat, 50 org ujian Penyesuaian Ijazah	103,800,000
3 04 01 30 09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah sidang kasus pelanggaran disiplin PNS	Padang Panjang	55 kali sidang	75,000,000	APBD		70 kali sidang	105,000,000
3 04 01 30 11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang dikirim untuk tugas belajar, kerja sama pendidikan dan izin belajar	Padang Panjang	Tubel : 14 orang, SK Tubel : 4 orang, SK lbel : 30 orang	227,270,000	APBD		Tubel : 14 orang, SK Tubel : 4 orang, SK lbel : 30 orang	227,270,000
3 04 01 30 20	Pengembangan PNS Melalui Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan karir fungsional	Padang Panjang	48 orang	29,925,000	APBD		48 orang	29,925,000
3 04 01 30 38	Kegiatan Proses Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Proses Penerbitan KARIS, KARSU, KARTU dan KARPEG	Jumlah PNS yang berhak menerima piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Jumlah Karis, Karsu dan Karpeg	Padang Panjang	50 piagam satya lencana, dan 50 KARIS. KARSU dan KARPEG	49,720,000	APBD		50 piagam satya lencana, dan 50 KARIS. KARSU dan KARPEG	49,720,000
3 04 01 30 40	Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural	Terseleksinya pejabat struktural	Padang Panjang	13 orang	252,500,000	APBD		13 orang	252,500,000
3 04 01 30 42	Ujian Kompetensi PNS yang Akan Pindah Ke Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah Pegawai yang mengikuti ujian kompetensi pindah	Padang Panjang	50 orang	37,000,000	APBD		50 orang	37,000,000

<b>3 04 01 16</b>	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah</b>				<b>92,640,000</b>				<b>98,761,500</b>
3 04 01 16 02	Penataan dan Penyelamatan Dokumen dan Arsip PNS	Jumlah dokumen pegawai unit kerja yang ditata	Padang Panjang	400 File	31,425,000	APBD		300 file	31,425,000
3 04 01 16 27	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah buku data pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	Padang Panjang	40 buku	61,215,000	APBD		40 buku	67,336,500
<b>3 04 01 34</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>				<b>1,466,595,000</b>				<b>1,466,595,000</b>
3 04 01 34 02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM I, II, III, IV dan diklat pra jabatan	Padang Panjang	26 orang	748,325,000	APBD		26 orang	748,325,000
3 04 01 34 03	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Terlaksananya pengiriman peserta diklat peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Padang Panjang	30 orang	718,270,000	APBD		30 orang	718,270,000
	<b>JUMLAH</b>				<b>9,037,730,000</b>				<b>4,789,703,500</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu kebijakan nasional. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Dimana tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur dapat dipertanggung jawabkan, baik secara kualitas maupun biaya.

Untuk mendukung reformasi birokrasi secara nasional tersebut, maka BKPSDM tentu harus menyikapinya dengan positif serta mempersiapkan kegiatan yang dapat mendukung kebijakan nasional dimaksud. Untuk itu, rencana kerja yang ditetapkan setiap tahun, harus mampu menceminkan arah reformasi birokrasi, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berpijak pada kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi tersebut, maka diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM akan menghasilkan nilai-nilai yang positif, terutama dalam hal pelaksanaan manajemen kepegawaian. Sebab sasaran reformasi birokrasi akan sulit terwujud jika BKPSDM yang memiliki fungsi manajemen kepegawaian tidak menjalankan fungsinya tersebut dengan baik.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah telah mencanangkan beberapa program, seperti Netralitas PNS dan Peningkatan Profesionalitas PNS, Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik (e-government), Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri, Pencanaan Pakta Integritas, Percepatan Pemberantasan KKN, Optimalisasi Penggunaan SAPK dan Penyempurnaan Peraturan Disiplin PNS.

Sebagaimana arahan Menteri dan Wakil Menteri PAN-RB dalam berbagai kegiatannya menyebutkan bahwa Pemerintah mengagendakan pembaharuan paradigma PNS, yaitu meningkatkan kinerja, perampingan struktur organisasi dan penggantian jabatan struktural dengan fungsional. Disamping itu terdapat beberapa kebijakan lain yang perlu disikapi, terutama untuk meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam menyongsong era perubahan yang sudah dekat tersebut.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

##### **a. Tujuan**

Tujuan dan sasaran Renja BKPSDM pada intinya juga mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018. Selain itu Renja BKPSDM Tahun 2018 ini merupakan gambaran keadaan masa mendatang tentang kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Kota Padang Panjang yang dapat direalisasikan. Tujuan dari Rencana Kerja 2018 BKPSDM Kota Padang Panjang adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan disiplin aparatur dengan berlandaskan pada kualifikasi pendidikan dan kompetensi jabatan, serta meningkatkan kesejahteraan PNS.
2. Terlaksananya pelayanan manajemen kepegawaian secara keseluruhan yang tepat waktu dan tepat orang, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data aparatur dengan seluruh OPD guna mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian.

#### **b. Sasaran**

Secara umum, sasaran adalah hasil dari proses atau kegiatan yang diinginkan oleh organisasi. Isu-isu penting terbaru yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pada BKPSDM adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka BKPSDM harus menyikapi dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari BKPSDM, seperti Pembentukan Tim Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, Rekrutmen CPNS, serta pembinaan dan pengawasan peningkatan disiplin PNS sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Selain isu-isu tersebut di atas, isu lain yang cukup penting terkait dengan pelaksanaan tugas BKPSDM adalah adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN untuk lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian. Untuk itu BKN merancang sistem pelayanan kepegawaian yaitu Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). SAPK ini terhubung langsung (Online) dengan BKN Pusat dan BKN Regional XII Pekanbaru, termasuk diantara pelayanan kenaikan pangkat. Untuk perbaikan dan percepatan pelayanan administrasi kepegawaian bagi seluruh aparatur Kota Padang Panjang, BKPSDM perlu memberikan perhatian lebih dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ini.

Isu penting yang terkait dengan sasaran Renja BKPSDM adalah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Salah satu cara dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Kondisi saat ini, dengan belum adanya gedung diklat yang representatif, maka pelayanan diklat oleh BKPSDM, setiap tahunnya belum optimal. Untuk itu dalam Renja BKPSDM tahun 2018 ini, diusulkan lanjutan pembangunan gedung kantor sekaligus ruang diklat yang representatif. Diharapkan dengan adanya gedung diklat yang representatif, sasaran yang ingin dicapai oleh BKPSDM dapat diwujudkan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Renja BKPSDM tahun 2018, sesuai dengan fungsi, isu strategis, maupun kebijakan nasional ada sebanyak 9 program dan 36 kegiatan yang merupakan Prioritas I yang terdiri dari :

#### **PRIORITAS I**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | : 11 kegiatan |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | : 4 kegiatan  |
| 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | : 1 kegiatan  |
| 4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS                                   | : 1 kegiatan  |
| 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                         | : 2 kegiatan  |
| 6. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja<br>Dan Keuangan | : 4 kegiatan  |
| 7. Program Pendidikan Kedinasan   | : 2 kegiatan  |
| 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                | : 9 kegiatan  |
| 9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah                 | : 2 kegiatan  |

Dengan adanya program dan kegiatan yang direncanakan tersebut, diharapkan mampu mewujudkan aparatur Kota Padang Panjang berkualitas dan professional, sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Untuk itu, maka program dan kegiatan yang direncanakan tersebut dapat diakomodir oleh pihak terkait dan dapat direalisasikan. Program dan kegiatan BKPSDM tahun 2018 sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.4.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berikut ini ada beberapa poin penting yang terkait dengan isu-isu strategis nasional, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BKPSDM, sehingga dapat dijadikan prioritas kegiatan BKPSDM tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Rencana Strategis Nasional 2010-2025 tentang reformasi birokrasi, di mana bagian dari reformasi birokrasi tersebut adalah mewujudkan aparatur yang profesional dalam pelayanan serta memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Dengan demikian, kegiatan BKPSDM yang mendukung reformasi birokrasi tersebut, dapat dijadikan prioritas kegiatan tahun 2018, sehingga pembiayaannya dapat ditampung pada anggaran tahun 2018.
2. Implementasi Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang diluncurkan oleh BKN dan harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini BKPSDM. SAPK ini adalah sistem pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi yang Online antara BKPSDM dengan BKN Pusat dan BKN Regional. Dengan demikian, kegiatan yang terkait dengan SAPK ini tetap ditampung pada kegiatan BKPSDM tahun 2018.
3. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dimana Peraturan Pemerintah ini pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Untuk itu, Renja BKPSDM tahun 2018 yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, seperti kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan tim pendukung lainnya dapat kiranya ditampung pada kegiatan BKPSDM tahun 2018.
4. Diklat merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas, dimana hal ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dengan demikian, kegiatan BKPSDM yang terkait dengan Diklat Struktural, Teknis Fungsional, Tugas dan Izin Belajar, serta sarana dan prasarana seperti lanjutan pembangunan gedung kantor dan ruang diklat, kiranya dapat ditampung dan dialokasikan dananya pada kegiatan BKPSDM tahun 2018.
5. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 terkait implementasi pembentukan OPD baru dan pengisian jabatan struktural..

Dari uraian tersebut di atas pada dasarnya kegiatan BKPSDM yang diajukan pada Renja tahun 2018, merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan aparatur yang profesional. Walaupun dana APBD Kota Padang Panjang terbatas, namun usulan Renja BKPSDM tahun 2018, dapat kiranya dijadikan prioritas untuk disediakan

dananya pada APBD Kota Padang Panjang tahun 2018. Selain itu, kegiatan yang juga menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan aparatur Kota Padang Panjang juga dapat menjadi masukan serta dapat disediakan dananya pada kegiatan BKPSDM tahun 2018. Hal ini didasarkan bahwa, untuk menciptakan aparatur yang profesional, maka harus didukung oleh tingkat kesejahteraan yang memadai sesuai dengan kinerja dan beban tugas.

Dengan demikian usulan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tahun 2018 ini, keberhasilannya juga ditentukan dan butuh dukungan dari seluruh stakeholder yang berkaitan dengan perwujudan aparatur yang profesional, sebagaimana cita-cita reformasi birokrasi yang digariskan pada Rencana Strategis Nasional tahun 2010-2025.

Padang Panjang, Maret 2017  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM  
KOTA PADANG PANJANG**



**MARTONI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I / NIP. 19730304 199308 1 001



